

Vol. 3 • No. 2 • Juli 2023

Page (Hal.) : 1568 – 1572

ISSN (online) : 2746 - 4482

ISSN (print) : 2746 - 2250

© LPPM Universitas Pamulang

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

Email : humanisproceedings@gmail.com



Special Issue :

Webinar Nasional
HUMANIS 2023

Website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>

Strategic Human Resource Planning and Staffing Bidang Militer

Yanuar Firmansyah

*Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia
yanuarfirmansyah@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Produk Miniso Atrium Senen, (2) Pengaruh Kualitas terhadap Keputusan Pembelian Produk Miniso Atrium Senen, (3) Pengaruh Harga terhadap Produk Miniso Atrium Senen Keputusan pembelian, (4) pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk Miniso Atrium Senen, dan (5) pengaruh citra merek, kualitas, harga, promosi, promosi, pada pembelian,. Hasil pengujian dan analisis nilai F hitung $> F$ tabel atau $44.746 > 3,09$ dan nilai signifikansi $0,05$ atau $0,00 < 0,05$ maka secara simultan terdapat pengaruh brand imagery, kualitas, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (KD) sebesar $0,639$ atau $63,90\%$, artinya sebesar $63,90\%$ kontribusi atau pengaruh variabel Citra Merek (X1), (X2), Harga (X3) dan Promosi (X4) secara simultan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). sedangkan sisanya sebesar $36,10\%$ merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Saran untuk Atrium Miniso Senen ke depan lebih ditingkatkan dan dipertahankan lagi kualitas produknya, memberikan diskon dan membuat promosi yang menarik minat konsumen untuk berbelanja.

Kata Kunci: Citra Merek; Kualitas; Harga; promosi; Keputusan Pembelian

Abstract

The study aims to find out: (1) the influence of Brand Image on Miniso Atrium Senen product Purchase Decision, (2) the effect of Quality on Miniso Atrium Senen product Purchase Decision, (3) the influence of Price on Senen Miniso Atrium product Purchase Decision, (4) promotional influence on Miniso Atrium Senen product Purchase Decision, and (5) brand image influence, quality, price, promotion, promotion, on Purchasession,. The test results and analysis of the value of F count $> F$ table or $44,746 > 3.09$ and the signification value of 0.05 or $0.00 < 0.05$ there is then the simultaneous influence of brand imagery, quality, price and promotion to the purchase decision. This is evidenced by a determination coefficient value (KD) of 0.639 or 63.90% , meaning 63.90% contribution or influence of Brand Image variable (X1), (X2), Price (X3) and Promotion (X4) simultaneously to Purchase Decision variable (Y). while the rest amounted to 36.10% was the influence of other factors not researched. The suggestion for Senen's Miniso Atrium forwards further improved and maintained again the quality of the product, providing discounts and making promotions that attracted consumers to shop.

Keywords: Brand Image; Quality; Price; Promotion; Purchase Decision

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting bagi sebuah institusi militer. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya institusi dalam upaya pencapaian visi dan misi, mutlak bergantung pada keberadaan sumber daya manusia yang kompeten. Indonesia sendiri sebenarnya telah termasuk dalam negara yang disegani dunia pada bidang kemiliterannya, terkhusus pada kekuatan ketahanan fisik dan bertahan hidup serta

keberanian dan siap tempur saat konflik tengah terjadi. Sejak lama memang masyarakat Indonesia memang dikenal dengan keuletan dan kegigihan dalam mengerjakan segala sesuatu. Pada tahun 1960-an di masa kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno, kekuatan militer adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, diperlukan investasi besar-besaran sejak saat ini terutama pengembangan sumber daya manusia (SDM). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan sesuatu yang bersifat imperatif dan menjadi kekuatan utama suatu negara dalam menggerakkan pembangunan bangsa atau pun mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi UUD'45 tentang tujuan bangsa Indonesia, yaitu; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemampuan suatu negara dalam membangun kekuatan pertahanannya harus selalu dikaitkan dengan kemampuan konversi sumber daya nasional yang dimilikinya menjadi suatu instrumen kekuatan bersenjata yang efektif. Salah satu sumber daya nasional berupa SDM, memainkan peran penting dalam menjaga pertahanan.

Dalam konteks SDM pertahanan, jumlah personel tentara yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 0,2% dari jumlah penduduk nasional, atau setiap 1.000 penduduk hanya terdapat 2 tentara. Kondisi yang tidak ideal ini tentu tidak sebanding dengan ancaman yang terjadi. Melimpahnya SDM nasional tidak serta-merta berbanding lurus dengan jumlah personel tentara, mengingat Indonesia tidak sedang dalam masa perang. Kebutuhan pertahanan harus ditingkatkan guna mengatasi potensi ancaman yang semakin meningkat, baik itu agresi militer negara lain ataupun gangguan dalam negeri. Oleh karenanya ketersediaan teknologi pertahanan mutlak diperlukan guna menutup kekurangan SDM yang ada.

Pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan sesuai konsep pertahanan berbasis kemampuan (*capability based defence*) tanpa mengesampingkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Membangun kekuatan pertahanan harus menyesuaikan dengan perkembangan perang masa depan yang dimulai dari saat ini, dimana bentuk perang konvensional semakin ditinggalkan. Di masa mendatang, bentuk perang lebih melibatkan pada penguasaan teknologi perang modern (*modern warfare*) yang dimiliki SDM suatu negara. Bentuk serangan pun tidak lagi berupa *state actor*, namun juga melibatkan *non-state actor* berupa gerilyawan dan milisi yang menyerang secara cepat di jantung pertahanan suatu negara, sebagai contoh serangan *World Trade Center (WTC)* di Amerika. Kita mengenal istilah "the man behind the gun", yaitu menempatkan manusia/prajurit sebagai unsur utama dalam pertempuran (perang). Namun ke depan, seiring meningkatnya Iptek, selain SDM sebagai unsur yang paling dominan, maka teknologi persenjataan yang dimiliki juga sangat menentukan dalam memenangkan pertempuran. Berubahnya tren perang mendorong kekuatan pertahanan Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan penguasaan senjata saja, tapi lebih lanjut berupa penguasaan teknologi dan keahlian khusus lainnya. Misalnya dalam menghadapi *asymmetric warfare* maka diperlukan keahlian penguasaan teknologi informasi yang canggih, berupa *skill hacker* dan *cracker*. Selain itu, bentuk ancaman terus bermunculan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda misalnya *Electronic Warfare*, *Information Warfare*, *Cyber Warfare*, dan *Psychological Warfare*. Keahlian dan kemampuan penguasaan teknologi pertahanan menjadi sangat penting, namun untuk menguasainya tidak diperoleh secara instan. Diperlukan proses panjang melalui *human investment* seperti pendidikan dan pelatihan ataupun transfer teknologi. Keunggulan pertahanan setiap negara akan bertumpu pada kemampuannya dalam memanfaatkan potensi SDM yang ada, tidak hanya menambah secara kuantitatif namun juga harus di-upgrade kualitasnya berupa keahlian khusus, kemampuan fisik dan moral. Begitu pula dengan alutsista, harus ditingkatkan kompetensinya.

KAJIAN LITERATUR

Postur pertahanan nasional diarahkan untuk membangun kekuatan yang bertaraf Minimal (*Minimum Essential Force*) dengan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Kekuatan (*force*) berarti jumlah alutsista yang dimiliki, termasuk SDM dan

pendukungnya. Modernisasi ini dilakukan dalam tiga tahapan, Renstra I (2010-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024). Setiap negara memiliki formulasi yang berbeda-beda dalam perhitungan KPM-nya. Kekuatan ideal tentunya merupakan keinginan yang hendak dicapai setiap negara, namun harus disesuaikan dengan kemampuan anggarannya. Indonesia sebagai negara berkembang (developing countries) masih sangat memerlukan ketersediaan anggaran bagi pembangunan ekonominya sehingga alokasi anggaran pertahanannya minimal. Suatu negara yang memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh dengan didukung kecanggihan alutsista akan disegani oleh negara lain.

Kesiapan penyerapan teknologi merupakan salah satu pilar dalam daya saing negara, merujuk pada laporan *The Global Competitiveness Report 2014-2015* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF). Peringkat Indonesia berada di posisi 34 dari 144 negara, semakin membaik dari tahun sebelumnya yang berada pada urutan 38. Artinya terdapat perkembangan positif kedepannya, namun peringkat ini masih dibawah Singapura di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand di peringkat 31. Kesiapan penyerapan teknologi ini dapat pula diukur dengan menggunakan teknometer, sebuah perangkat lunak yang menghimpun beberapa pertanyaan standar untuk setiap tingkatan dan menampilkannya secara grafis. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) merupakan suatu sistem pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan suatu teknologi tertentu dan perbandingan kematangan/kesiapan antara jenis teknologi yang berbeda.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas ini adalah metode *literature review* atau tinjauan kepustakaan. Metode ini adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur dan sumber-sumber terkait untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik tertentu. Metode ini bergantung pada penelitian dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik tugas. Metode penelitian kajian pustaka memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menggali pengetahuan yang ada dan memahami perkembangan terkini dalam bidang penelitian tertentu. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi celah pengetahuan, memperoleh pemahaman yang mendalam, dan menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan nasional suatu negara ditentukan oleh keuletan dan ketangguhan SDM-nya dalam mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan kapabilitas SDM pertahanan diperlukan dalam menjaga ketahanan nasional, berupa kordinasi kekuatan militer dan sipil. Peningkatan kapabilitas SDM ini sejalan dengan profesionalisme pertahanan, yang diinisiasi pertama kali oleh profesionalisme militer. Profesionalisme militer merupakan pembenahan SDM pertahanan di bidang militer, mengacu pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Huntington memandang profesionalisme militer meliputi tiga hal pokok yaitu: keahlian (*expertise*), tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan organisasi yang mengikat (*corporateness*). Dari sisi keahlian, profesionalisme militer dipandang sebagai keahlian spesifik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta tidak dikuasai sembarang orang. Profesionalisme pun menuntut tanggungjawab sosial yang tinggi kepada warga negara secara keseluruhan. Organisasi yang mengikat dengan bersumber pada doktrin organisasi. Profesionalisme tidak akan muncul bilamana militer masih dihadapkan dengan peran yang lain dan tidak berhubungan dengan kemiliteran. Militer hanya mengabdikan kepada kepentingan negara dan harus bersikap netral dengan tidak memihak pada satu golongan tertentu.

Profesionalisme militer dapat pula dipraktekkan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan sipil, terutama peran pemuda dalam menjaga pertahanan, salah satu bentuknya adalah wajib militer. Tidak adanya UU wajib militer menyebabkan Indonesia tidak menerapkan wajib militer kepada penduduknya. Pentingnya wajib militer yaitu untuk

menumbuhkan kesadaran bagi rakyat (sipil) untuk ikut serta dalam mempertahankan keutuhan bangsa dari berbagai dimensi ancaman yang muncul. Di negara-negara maju, wajib militer masih dipraktekkan terhadap pemudanya, sebagai persiapan perang dimasa damai (*Ad Bellum Pace Parati*). Salah satu Rancangan Undangundang yang mengusulkan mengenai pentingnya wajib militer, yaitu RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Berbagai bentuk ancaman saat ini dan kedepan maka wajib militer akan sangat diperlukan. Tugas pertahanan tidak lagi hanya diemban oleh tentara dan polisi, diperlukan keterlibatan sipil terutama pemuda dalam menjaga pertahanan Indonesia. Mengingat lemahnya disiplin masyarakat Indonesia, serta masih jauhnya kondisi bangsa yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan nasional yang bermutu dan menjangkau mayoritas rakyat, maka wajib militer dapat sangat besar perannya bagi usaha pembangunan bangsa. Kemampuan SDM pertahanan sipil pun harus ditingkatkan melalui penguasaan teknologi yang ada. Berubahnya bentuk perang kedepan semakin memerlukan keterlibatan sipil sebagai salah satu kekuatan penangkalnya.

Kesiapan menghadapi perang ditunjukkan melalui modernisasi alutsista yang dimiliki oleh suatu negara, karena sangat berpengaruh terhadap kemampuan diplomasi internasionalnya. Negara-negara maju memiliki alutsista yang canggih agar disegani negara lain, yaitu berupa kekuatan penangkal (*deterrent effect*) dari agresi militer asing. Perang memang bukanlah pilihan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa antar negara, namun demikian pembangunan kekuatan pertahanan di dunia tetap menonjol mengingat kekuatan pertahanan merupakan bagian dari diplomasi. Kekuatan militer yang modern harus diimbangi dengan kualitas SDM, alutsista, strategi, hingga sistem pendidikan pertahanan yang modern dan profesional. Kesiapan lainnya berupa penguasaan teknologi melalui penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, guna mendorong perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas SDM, sesuai dengan perkembangan zaman. Sinergitas juga diperlukan antar institusi yang terkait, guna meningkatkan interaksi riset (pertukaran pengetahuan dan pengalaman) agar hasilnya semakin berkualitas dan meminimalisir ketidakpastian (*uncertainty*). Sistem pertahanan yang kuat bukan saja mampu menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa, namun juga menjadi instrumen yang efektif untuk kekuatan penangkalan (*deterrent*) dan bargaining position dalam hubungan internasional dengan negara lain. Sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari sumber daya nasional, SDM merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu, pembinaan SDM harus menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan SDM pertahanan yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari Materi Yang Disampaikan Diatas Dapat Disimpulkan Bahwa Pelibatan Sdm Pertahanan Ini Haruslah Menekankan Profesionalisme, Berupa Keahlian Yang Dimiliki (*Expertise*), Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*), Dan Organisasi Pertahanan Yang Mengikat (*Corporateness*).

Saran

Dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia pada pada bidang tugas yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, sehingga dapat optimal menempati posisi staf atau kerja sesuai dengan *Job Description* dan *Skill*.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, R. E. (1999). Teknik Analisa GAP Pengembangan Teknologi Informasi. *Renaissance Research Center*.
- Lee, C. (2017). "GAP Analysis", in Social Issue in the Workplace. *Perkembangan Skadron-Skadron TNI Angkatan Udara*. (2014, July 11). Diambil kembali dari TNI AU - TNI Angkatan Udara: <http://tni-au.mil.id/content/perkembangan-skadron-skadron-tni-angkatan-udara>

